
TEORI PERKEMBANGAN PENGELOUARAN PEMERINTAH KAJIAN EKONOMI SYARIAH

Yulianti¹, Daud²

^{1,2}STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

yuainty17@gmail.com

daudvanjava12@gmail.com

Corresponding Author: Daud

Abstrak

Pengeluaran Pemerintah merupakan suatu penggunaan uang yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan juga dengan penggunaan uang atau sumberdaya pada suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Metode penelitian ini teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam rangka pembahasan masalah penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, dan artikel. Model pembangunan tentang Pengeluaran negara diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: *pengeluaran negara, hukum wegner, Teori peacock wiseman,*

PENDAHULUAN

Pengeluaran Pemerintah merupakan suatu penggunaan uang yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan juga dengan penggunaan uang atau sumberdaya pada suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Menurut Mardiasmo (2002:185), Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan sebagai kegiatan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah tersebut mencerminkan pada sebuah kebijakan pemerintah. Jika suatu pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu bagian dari kebijakan pemerintah yakni kebijakan fiskal yang merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur suatu jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Dalam suatu teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yaitu *pertama*, Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. *Kedua*, Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. *Ketiga*, Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang, yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment memiliki status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai walaupun secara administrasi keduanya berbeda (Boediono,1985).

LANDASAN TEORI

Merlin Anggreini menyebutkan bahwa di dalam buku Marzuki Ilyas tahun 1989 di hal 38 bahwa pengeluaran pemerintah itu menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa, pengeluaran pemerintah dari sisi mikro itu dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebuah akibat dari adanya kegagalan pasar. Sedangkan dalam sisi makro pengeluaran pemerintah digunakan untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik.

Hukum Wagner dikenal sebagai hukum peningkatan pengeluaran negara. Adolph Wagner (1835–1917), Mengamati pengeluaran negara pada negaranya sendiri dan kemudian berjalan untuk negara lain. Teori ini berguna untuk negara manapun, yang mana pengeluaran publik meningkat secara konstan dengan seiring dan pertumbuhan pendapatan yang meluas.

Teori humum Wagner pada jurnal hukum ekonomi dan bisnis, dijelaskan pengeluaran pemerintah dan diartikan sebagai perkembangan pengeluaran pemerintah baik secara absolut dan secara relatif. Hukum Wagner juga menyatakan bahwa adanya kemungkinan perkembangan pengeluaran pemerintah mungkin berbeda-beda antara level pemerintah pusat dan level pemerintah daerah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nin Made menjelaskan bahwa Wagner menyadari adanya batas dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah, yang dikarenakan peningkatan pengeluaran pemerintah pasti akan diikuti dengan peningkatan pajak serta para pembayar pajak akan keberatan bila harus menanggung pajak yang semakin tinggi untuk membiayai kenaikan pengeluaran pemerintah.

METODOLOGI

Penulisan hasil pembahasan menggunakan dari telaah kajian pustaka. Sumber data yang digunakan sumber sekunder yakni jurnal dan data kepemilikan lembaga. Objek permasalahan adalah pengeluaran uang pada negara, teori peacock dan hukum wegner pada pengeluaran uang negara. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, jurnal, dan modul pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode library riset.

PEMBAHASAN

Model Pembangunan Tentang Pengeluaran Negara.

Model pembangunan tentang Pengeluaran negara diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar juga. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan terjadinya kegagalan pasar.

Musgrave berpendapat bahwa investasi swasta dalam persentase terhadap GNP (Gross National Product) semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Di dalam pemerintah pusat, terdapat dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi dua yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja digunakan antara lain untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Jika di dalam lingkup pusat di provinsi atau kabupaten terdapat APBD yang antara lain digunakan untuk pengeluaran, belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan itu terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, sedangkan pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, yaitu antara lain :

1. Pengeluaran Investasi. Pengeluaran yang ditujukan guna menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang mendatang. Misalnya, pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, bandara, satelit, bandara, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lainnya.
2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian pada masyarakat.
3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dapat membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya saja pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain sebagainya.
4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan. Pengeluaran penghematan masa depan itu adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung pada negara, tetapi apabila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.
5. Pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan di gunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah serta untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS).

Menurut Guritno, perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor ialah Perubahan permintaan akan barang publik, Perubahan dalam proses produksi, Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi dan Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Hukum Wegner.

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah itu semakin lama semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti dari teorinya yakni makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran pemerintah pun akan ikut meningkat, hal ini disebabkan terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, bisa dilihat ada beberapa pemicu semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan serta meningkatnya fungsi pembangunan.

Hukum Wagner dikenal dengan sebutan “The Law of Expanding State Expenditure” yang artinya hukum perluasan belanja negara. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah itu menjadi semakin besar, hal utamanya disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada sebuah teori yang disebut dengan organic theory of state yaitu teori

organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Wagner menyatakan hukum tentang pengeluaran pemerintah, dan ini bisa diartikan sebagai perkembangan pengeluaran pemerintah baik secara absolut dan secara relatif. Wagner juga menyatakan adanya kemungkinan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah mungkin berbeda-beda antara level pemerintah pusat dan level pemerintah daerah. Perbedaan ini menyangkut fungsi dasar dari pemerintah yaitu, pengeluaran untuk bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dalam tanggung jawab pemerintah dalam konsep welfare state seperti akses pendidikan, jaminan pensiun, dan tunjangan pada pengangguran.

Teori peacock Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berusaha memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan pembesaran pada penerimaan pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Pada kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada suatu teori bahwasanya masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat akan mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak atas kesadaran bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah. Tingkat toleransi ini menjadikan pemerintah tidak untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat tiga efek yang menyebabkan pajak tidak bisa menurun kembali pada tingkat semula pada saat terjadi perang Ekonomi, yakni efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang atau gejolak perekonomian yang disebut dengan efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

KESIMPULAN

Rostow dan Musagrave telah memperkenalkan dan mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran negara yang mana ia menghubungkan perkembangan

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pengeluaran pemerintah yakni digunakan antara lain untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Menurut sifatnya pengeluaran negara yakni meliputi Pengeluaran Investasi, Pengeluaran penciptaan lapangan kerja , Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, Pengeluaran Penghematan Masa Depan, dan Pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan di gunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah serta untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS).

Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran pemerintah pun akan ikut meningkat. Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada suatu teori bahwasanya masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

REFERENSI:

- Anugra, Ranifal, dkk. (2016). Analisis Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 14(1), 34
- Anwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*.Vol.20 No.2.
- Budiono. (1998). Teori Pembangunan Tentang Pengeluaran Negara.5
- Made, Ni Sukartini & Saleh, sasumbar. Pengujian hukum Wagner dalam perekonomian Indonesia. Vol.19 No.1
- Nurhayani. (2012). Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Paradigma Ekonomi*. Vol 1 No.5, 11
- Prasetya, Farry. 2012. Modul Ekonomi Publik Pemerintah Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah
- Solikin, Ahmad. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (hukum Wegner) di Negara Sedang Berkembang. *Jurnal Info Artha*. Vol.12 No. 1
- Zahari,M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomi: Jurnal Of Economics and Business*. Vol. 1 No. 1, 187